

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Keuangan Daerah

Mamesah sebagaimana dikutip oleh Halim (2004) bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”(Amin, 2019: 4)

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.2.1. Pengertian APBD

Menurut Domai (2012) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (Amin, 2019: 82)

2.1.2.2. Struktur APBD

Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (Amin, 2019: 87)

1. Pendapatan daerah

Adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali / pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

2.1.3. . Belanja Daerah (Pengeluaran Pemerintah Daerah)

2.1.3.1. Pengertian Belanja Daerah

Halim (2002) dengan mengutip dari IASC *framework* menjelaskan bahwa biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Lebih lanjut, PP. No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.(Amin, 2019: 19)

Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002) menjelaskan bahwa Belanja Daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva ekuitas netto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri.(Amin, 2019: 19)

Definisi dan batasan Belanja Daerah juga dapat ditemukan pada Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, diungkapkan bahwa

pengertian belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih . hampir senada dengan definisi di atas, Sri Lesminingsih (2001) menyimpulkan bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah (Amin, 2019: 20).

2.1.3.2. Tujuan Belanja Daeah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan dari belanja daerah dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut: (Amin, 2019: 20)

- a. Merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang tersedia pada suatu negara/daerah.
- b. Sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik
- c. Sebagai alat untuk memperinci penggunaan sumber-sumber yang tersedia menurut objek pembelanjanya sehingga memudahkan pengawasan atas pengeluarannya
- d. Sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk perbatasan pengeluaran.

- e. Sebagai alat untuk menampung menganalisis,serta mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang diusulkan
- f. Sebagai pedoman atau tolak ukur serta alat pengawasan atas pelaksanaan kegiatan,program, dan proyek yang dilakukan pemerintah.

2.1.3.3. Kelafikasi Belanja Daerah

Klafikasi belanja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dijelaskan bahwa klasifikasi belanja pemerintah meliputi: (Amin, 2019: 21)

- a. Klasifikasi belanja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabuapaten/kota yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- b. Klasifikasi belanja menurut fungsi bertujuan untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada Peratauran Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akutansi pemerintahan. menurut klafikasi ini, belanja terdiri atas: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
- c. Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan

program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan (misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai belanja buletin teknis penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah langsung, sedangkan belanja yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai belanja tidak langsung.

2.1.3.4. Belanja Daerah dalam APBD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja pemerintah daerah yang diklasifikasikan berdasarkan 2 jenis belanja yaitu, belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam struktur APBD, kelompok belanja langsung diantaranya adalah: dalam (Amin, 2019: 22)

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah

b. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan /material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana

mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribunya, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulaangan pegawai.

c. **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi jaringan dan aset tetap lainnya.

2.1.3.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah

Jumlah Pengeluaran Pemerintah dalam suatu periode tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sebagai berikut: (Sukirno, 2006).

- a) Jumlah pajak yang akan diterima
- b) Tujuan-tujuan Ekonomi yang akan dicapai
- c) Pertimbangan Politik dan Keamanan

2.1.4. Pendapatan Daerah

2.1.4.1. Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut (Mauludi, 2016) Sejak berlangsung nya era otonomi daerah pemerintah daerah (PEMDA) dituntut mandiri dan kreatif dalam mengelola keuangan daerah. Besarnya jumlah pendapatan daerah tentunya sangat menentukan pelaksanaan tugas dan kelancaran program kerja pemerintah di daerah (Amin, 2019: 35). Menurut (suhadak dan nogroho, 2007) kemampuan

daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah selalu merasa sumber daya yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat di tuduh enggan berbagai pendapatan dengan daerah. Jika hal ini terjadi terdapat kondisi yang tidak kondusif bagi revitalisasi pemerintah daerah. Untuk itu perlu di pahami terlebih dahulu berbagai jenis sumber penerimaan daerah.(Amin, 2019: 36).

Menurut (Hasni, 2006), Manajemen keuangan sektor publik secara sederhana didefinisikan sebagai bagaimana pemerintah mencari sumber pendapatan dan bagaimana pemerintah mengaplikasikannya (*how to get fund and how to allocate the fund*) sejak era reformasi khususnya reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pendanaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi, maksudnya agar terlalu mengandalkan atau menggantungkan pada harapan pemerintah pusat, tetapi mandiri sesuai dengan cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah .Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.(Amin, 2019: 36).

2.1.4.2.Sumber-sumber Penerimaan Daerah: Perspektif Teoritis

Menurut Suhadak dan Nugroho, 2007 mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah itu ada 3 yaitu:(Amin, 2019: 36-39)

- *Transferred or assigned income* (dana transfer) dari susunan pemerintahan di atasnya
- *Loans* (pinjaman)
- *Locally raised revune* (pendapatan asli daerah)

2.1.4.3. Sumber-sumber Penerimaan Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan

Jika dilihat dari peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka penerimaan daerah terdiri dari dua komponen yaitu pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. (Amin, 2019: 46-57)

1. Pendapatan Daerah

Menurut (Suhadak dan Nugroho, 2007) Berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat di capai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayarkan kembali. Pendapatan daerah di kelompokkan atas :

pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Amin, 2019: 46)

2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Penerimaan pembiayaan daerah mencakup:

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan
- Penerimaan pinjaman daerah
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Penerimaan piutang daerah

2.1.4.4. Faktor-faktor Penerimaan/Pendapatan daerah

Penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor-faktor di antaranya sebagai berikut: (Amin, 2019: 68)

- Jumlah Penduduk
- Luas wilayah
- Serta faktor-faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan

2.1.4.5. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah meliputi beberapa bagian.

(Amin, 2019: 4):

- a. Asas terintegrasi, yang berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b. Asas tanggung jawab, yang bermakna bahwa keuangan daerah dikelola:
 - Secara tertib, yakni keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Taat pada peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu

- Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah
- Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
- Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya /keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif
- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional
- Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat .

2.1.5. Pengertian Jumlah Penduduk

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan

menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. (Bidarti, 2020:1)

Jumlah penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah maka banyak yang harus di canangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat, kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan agama atau etnisitas tertentu. (Bidarti, 2020: 2)

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umum, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian,

persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (Bidarti, 2020: 2)

2.1.5.1. Masalah Kependudukan

Pada dasarnya masalah kependudukan merupakan suatu sumber masalah sosial yang penting, oleh karena penambahan penduduk dapat menghambat penduduk dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak dapat terkontrol secara efektif. Masalah sosial sebagai akibat penambahan penduduk tidak hanya dirasakan oleh masyarakat-masyarakat pada daerah tertentu, melainkan dirasakan pula oleh masyarakat secara seluruh. Dalam suatu negara. Akibat penambahan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Di Indonesia telah melakukan berbagai usaha dalam rangka pengaturan penambahan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Kecuali itu juga dilakukan program transmigrasi, yang dimaksudkan sebagai usaha pemerataan atau keserasian jumlah penduduk di seluruh wilayah tertentu. (Bidarti, 2020: 10)

2.1.5.2. Teori-Teori Kependudukan

a. Aliran Malthusian

Thomas Robert Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "*essay on population*", *essay on population*", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu

manusia tak dapat di tahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya, jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan pertimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali pada teori malthus. (Bidarti, 2020: 17)

b. Aliran Marxist

Dasar pegangan marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan marxist dan malthus adalah pada "*Natural Resource*" tidak bisa dikembangkan atau mengembangki kecepatan pertumbuhan penduduk.

Berikut ini adalah beberapa pendapat aliran marxis. (Bidarti, 2020: 19-20)

- a. Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja
- b. Kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi kaum kapilitas mengambil sebagian hak para buruh.
- c. Semakin tinggi tingkat populsi manusia, semakin tinggi produktivitasnya, jika teknologi tidak menggantikn tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori malyhus tentang moral *restairant* untuk menekan angka kelahiran

2.2. Teori Hubungan

2.2.1. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran pemerintah

Menurut Aditya Putra Widiagma (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu daerah, maka belanja modal pada daerah tersebut menjadi semakin tinggi. (Nurul Hutami Ningsih: 2018)

Jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja daerah. Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan di pandang sebagai aset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai aset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. (Andri Devita: 2014)

2.2.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah

Teori Peacock dan Wiseman yang berpendapat bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori peacock dan wiseman adalah pemerintah menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya

penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Mangkoesoebroto,2016 dalam (Nisya: 2021). Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatkan penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.(Nisya: 2021)

2.3. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penelitian	Judul penelitian,jurnal,volume,nomor dan tahun	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Makdalena F Asmuruf, Vikie A. Rimate, dan George M.V .Kawung	Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Kota Sorong, Jurnal berkala ilmiah efisiensi, volume 15 No.05 tahun 2015	Secara keseluruhan variabel PDRB dan Jumlah penduduk berpengaruh positif atau signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	- Sama-sama meneliti variabel bebas Jumlah Penduduk	- Penelitian sebelumnya menggunakan alat analisis regresi berganda, sedangkan peneliti menggunakan alat analisis regresi data panel - Variabel terikat peneliti sebelumnya adalah PAD, sedangkan peneliti sendiri menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah
2	Andri Devita,Arman Delis,dan Junaidi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi	Varibel PAD dan DAU berpengaruh positif atau signifikan	-Sama-sama meneliti variabel bebas jumlah Penduduk -Sama-sama menggunakan	-Penelitian yang sebelumnya menggunakan variabel terikat adalah Belanja Daerah sedangkan penelitian saya sendiri

		Jambi, jurnal perspektif pembiayaan dan pembangunan daerah, vol.2 No.2, Oktober-Desember 2014	sedangkan Jumlah Penduduk dan Belanja langsung memiliki hubungan yang negatif	alat analisis regresi data panel	menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah
3	Evi Adriani dan Sri Indah Handayani	Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merangin, Jurnal ilmiah universitas batanghari Jambi vol.8 No.2 juli tahun 2008	Variabel PDRB terhadap PAD memiliki hubungan positif sedangkan Jumlah Penduduk terhadap PAD memiliki hubungan negatif	- Sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu Jumlah Penduduk. - Sama-sama menggunakan alat analisis regresi data panel	- Penelitian yang sebelumnya menggunakan variabel terikat adalah PAD sedangkan penelitian saya sendiri menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah
4	Nisya Permata Putri	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019	Variabel jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah tidak	- Sama-sama menggunakan variabel yang sama yaitu jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah	- Penelitian sebelumnya menggunakan alat analisis regresi berganda, sedangkan peneliti menggunakan alat analisis regresi data panel - Variabel terikat peneliti

			berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Dan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PAD berpengaruh signifikan terhadap PAD		sebelumnya adalah PAD, sedangkan peneliti sendiri menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah
5	Etik Umiyati, Amril, Zulfaneti	Pengaruh Belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, Jurnal Sains Sosiohumaniora	Variabel Belanja modal, PDRB dan Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh signifikan terhadap Ipm	-Sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu Jumlah Penduduk dan pengeluaran/ belanja modal - Sama-sama menggunakan alat analisis regresi data panel	Penelitian sebelumnya Menggunakan variabel terikat IPM sedangkan peneliti saya yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah
6	Denni Slistio Mirza	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM di Jawa Tengah tahun 2006-	Variabel Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan	Sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pengeluaran/ belanja modal	Menggunakan variabel terikat IPM sedangkan peneliti saya yaitu Pendapatan Pemerintah

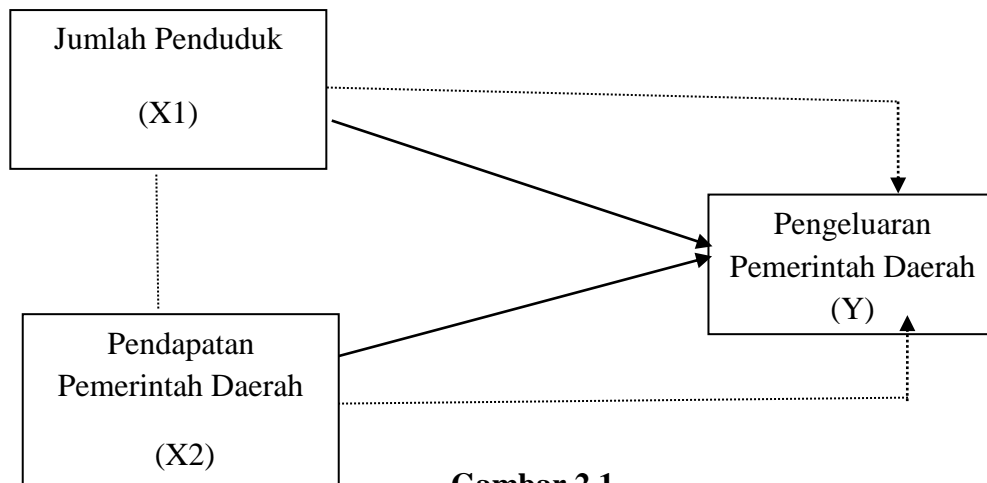
		2009, journal unns, EDAJ(1) (2012), 1ISSN 2252-6560	Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap IPM	- Sama-sama menggunakan alat analisis regresi data panel	Daerah
7	Safuridar, Natasya Ika Putri	Pengaruh IPM, Pengangguran dan Jumlah penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh bagian Timur, JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA, VOL. 3, NO. 1, APRIL 2019	Variabel Ipm, Pengangguran dan Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	-Sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu Jumlah Penduduk.	- Penelitian sebelumnya menggunakan alat analisis regresi berganda, sedangkan peneliti menggunakan alat analisis regresi data panel - Variabel terikat peneliti sebelumnya adalah Kemiskinan, sedangkan peneliti sendiri menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah
8	Nilafitri	Pengaruh Jumlah penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara, Vol, No:1 April 2019	Variabel Jumlah penduduk dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh	-Sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah	- Penelitian sebelumnya menggunakan alat analisis regresi berganda, sedangkan peneliti menggunakan alat analisis regresi data panel

			signfikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi		- Variabel terikat peneliti sebelumnya adalah Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan peneliti sendiri menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah
9	Muhamad Yasin	Analisis PAD dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupten/Kota Jawa Timur, Vol 3 No 2, Juni 2020	Variabel PAD dan Belanja Pembangunan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	-Sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu Pendapatan dan Belanja pembangunan/Pengeluaran	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan alat analisis PLS , sedangkan peneliti menggunakan alat analisis regresi data panel</p> <p>- Variabel terikat peneliti sebelumnya adalah Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan peneliti sendiri menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah</p>

10	Wia Rizqi Amalia, Wahyudin Nor, dan M Nordiansyah	Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2009-2013, Vol. 15, No. 1, Februari 2015: 1-12	-Variabel Pengaruh PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah		<p>Penelitian sebelumnya menggunakan alat analisis regresi berganda, sedangkan peneliti menggunakan alat analisis regresi data panel</p> <p>- Variabel terikat peneliti sebelumnya adalah Belanja Pemerintah Daerah sedangkan peneliti sendiri menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Pemerintah Daerah</p>
----	---	--	---	--	--

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- ▶ Secara Parsial
-▶ Secara Simultan

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara berdasarkan hasil teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya atas pernyataan dalam masalah penelitian melalui pengujian data empiris yang dihasilkan dari penelitian ini. Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016-2020 baik secara simultan maupun parsial.